



PEMERINTAH
KABUPATEN JOMBANG



RENCANA KERJA

2025

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No. 151 Jombang



Telp. 0321. 873333 Fax. 0321. 851733



dpmpstsp.jombangkab.go.id

JOMBANG
SANTRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2025, ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan rencana dan tujuan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini disusun sebagai upaya mengarahkan semua unsur kekuatan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul untuk mencapai tujuan dan sasaran tahunan yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra). Penyusunan Renja PD ini dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan juga sebagai pedoman dalam evaluasi pelaksanaan kinerja PD (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Diharapkan dokumen ini dapat dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh karyawan/karyawati Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Stake Holder terkait di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan pelayanan perizinan sesuai visi dan misi yang telah disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pelayanan perizinan bersifat sinergis, koordinatif dan dapat saling melengkapi.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2025 ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan senantiasa kami terima untuk perbaikan laporan di masa yang akan datang demi terwujudnya sebuah Pelayanan Perizinan yang Prima .

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2025 yang dapat kami sampaikan. Semoga mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik –

baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jombang, 15 Juli 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JOMBANG**



Dra. WOB WINDARI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19731204 199202 2 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	43
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	50
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	50
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	53
3.3 Program dan Kegiatan	55
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	69
BAB V PENUTUP.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023 (TBII) Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Jombang	17
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang.....	26
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2024	32
Tabel 2.4	Usulan dan Program Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024.....	44
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Jombang	61
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2024	69

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang sebagai organisasi perangkat daerah yang baru dibentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang merupakan gabungan antara SKPD Badan Pelayanan Perizinan dengan Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang. Dalam penyusunan Renja tahun 2025 ini berpedoman pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tahun 2024-2026, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan

musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja SKPD.

Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2025 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-Undang Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)
4. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

- Jangka Mengengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang tahun 2021-2041;
 18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 92 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
 19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;
 20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024.
 21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 86 Tahun 2023 tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang
 22. Surat Bupati Jombang Tanggal 22 November 2023 Nomor: 050/844/415.01/2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Derangkat Daerah (Renja PD) Tahun Anggaran 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk :

- a. Untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- b. Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat.
- c. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RKPD dengan Renja SKPD.
- d. Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu satu tahun dalam urusan perizinan, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Jombang.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Agar dapat ditetapkannya tahapan-tahapan kebijakan demi tercapainya pelayanan kepada para investor yang akan menanamkan investasinya selain itu juga untuk mewujudkan program-program yang telah dituangkan dalam kegiatan-kegiatan sesuai dengan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
2. Memberikan gambaran arah kebijakan dibidang pelayanan investasi yang ada di Kabupaten Jombang sehingga dapat didukung oleh kebijakan sektor lainnya mengingat masalah pelayanan bersifat lintas sektoral dan wilayah;
3. Memberikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan dibidang perizinan;

4. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;
5. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
6. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab 2

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 berpedoman pada sasaran pokok pembangunan jangka panjang (2005-2025) yang menetapkan Kabupaten Jombang sebagai Sentra Agribisnis di Jawa Timur. Mengingat bahwa Tujuan dan Sasaran RPD harus selaras dengan RPJPD, maka Sasaran 5 (tahunan) RPJPD Kabupaten Jombang tahun 2005 – 2025 adalah Visi RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 adalah

“Kabupaten Jombang sebagai Sentra Agribisnis di Jawa Timur Tahun 2025”

Selanjutnya dijabarkan ke dalam empat misi antara lain;

1. Mengembangkan tata pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian dan produk unggulan daerah;
4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur.

Berdasarkan telaah atas Visi dan Misi dokumen RPJPD Kabupaten Jombang di atas, Tujuan pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdayasaing;
3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Jombang yang Religius dan Berbudaya;
4. Meningkatkan Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi melalui Pemantapan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Pengembangan Agrobisnis dan Sektor Unggul Lainnya.

Berdasarkan tujuan RPD di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada tujuan RPD ke 1 dan 4.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2024-2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang ini menyajikan dasar pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang selama tahun 2024.

Berikut analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD atas capaian kinerja serta indikator kinerja yang termuat dalam dalam RPJMD Kabupaten Jombang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten

Jombang tahun 2018-2023, maka capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah sebagai berikut :

- Sasaran 1 : Meningkatnya Investasi Daerah

Pada tahun 2023 untuk sasaran Meningkatnya Daya Tarik Investasi dengan indikator kinerja Nilai Investasi Tahun n ditargetkan sebesar Rp 1,4 T (PMA dan PMDN). Target ini lebih rendah dari tahun 2022 yaitu Rp. 1,8 T (PMA, PMDN dan IUMK) dikarenakan nilai realisasi investasi yang dirilis secara Nasional oleh Kementerian Investasi RI/BKPM yaitu berasal dari PMA dan PMDN. Sehingga di tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 1,4T untuk PMA dan PMDN, dan dapat terealisasi sebesar Rp 1.715.913.003.483,- yang terdiri dari PMA sebesar Rp.295.058.878.540,- dan PMDN sebesar Rp. 1.420.854.124.943,-. Dari nilai realisasi investasi daerah tersebut, melebihi target sehingga capaian kinerja sasaran sebesar 122,57% dengan kategori Istimewa. Sedangkan di tahun 2022 untuk sasaran Meningkatnya Investasi Daerah dengan indikator kinerja Nilai Investasi Tahun n ditargetkan sebesar Rp 1,8 T (PMA, PMDN dan IUMK), dan terealisasi sebesar Rp. 2.353.636.647.045,- yang terdiri dari PMA sebesar Rp. 772.681.979.757,-, PMDN sebesar Rp. 860.729.633.874,- dan IUMK sebesar Rp 720.225.033.414,- Sehingga untuk Realisasi investasi PMA dan PMDN pada tahun 2022 sebesar Rp 1.633.411.613.631,-. Dari nilai realisasi investasi tersebut, di tahun 2022 capaian kinerja sasaran sebesar 90,75% dengan kategori Baik. Berdasarkan keterangan di atas bila dibandingkan pada tahun 2022, maka nilai realisasi investasi untuk tahun 2023 naik sebesar 5,05%, dengan kenaikan investasi sebesar Rp. 82.501.389.852,-. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk Nilai Investasi Daerah (PMA/PMDN) mengalami fluktuatif dikarenakan kondisi perekonomian pada umumnya.

- Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan perizinan pada tahun 2023 ditetapkan target sebesar 89,85. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini dapat terealisasi sebesar 89,94 yang diperoleh dari 893 responden tahun 2023, diantaranya terdiri dari 577 Fasilitasi Perizinan Berusaha, 245 Fasilitasi Perizinan Non Berusaha dan 71 Pelayanan

Kesekretariatan. Sehingga untuk capaian kinerjanya Sasaran tercapai sebesar 100,10 %, dengan kategori Baik. Sedangkan untuk Nilai IPP ditetapkan target sebesar 4,15 dan terealisasi sebesar 4,43 sehingga capaian kinerja sasaran untuk IPP tahun 2023 sebesar 106,75% dengan kategori Baik. Sedangkan tahun 2022 nilai SKM ditetapkan target sebesar 87,75. dapat terealisasi sebesar 85,11. Yang diperoleh dari jumlah responden sebanyak 397 responden/pemohon yang sudah terlayani. Sehingga untuk capaian sasaran kinerjanya tercapai sebesar 96,99 %, dengan kategori Baik. Sedangkan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada tahun 2022 ditetapkan target sebesar 4,10. Nilai IPP ini dapat terealisasi sebesar 4,61 dengan kategori Pelayanan Prima. Sehingga untuk capaian kinerjanya tercapai sebesar 112,44 %, dengan kategori Istimewa. Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa untuk nilai realisasi IKM pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada tahun 2023 dengan nilai sebesar 89,94 mengalami kenaikan sebesar 4,83 point atau sebesar 5,67% bila dibandingkan tahun 2022. Sedangkan untuk nilai realisasi IPP ditahun 2023 nilai IPP sebesar 4,43 mengalami penurunan sebesar 0,18 point atau sebesar 3,90% dari tahun 2022, namun masih dalam kategori Pelayanan Prima dan capaian kinerja sasaran kategori Baik. Hal ini dikarenakan Komitmen tinggi aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk selalu melakukan perbaikan dalam meningkatkan pelayanan prima/ service excellence kepada masyarakat, dukungan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan serta sarana/prasarana dan peralatan yang memadai.

- Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator nilai evaluasi AKIP di tahun 2022 dan 2023 ditetapkan target sebesar 81. Realisasi di tahun 2022 nilai evaluasi AKIP sebesar 80,39 dengan kategori (A) Memuaskan, dengan capaian kinerja sasaran sebesar 99,25%, atau kategori Baik. Dan realisasi tahun 2023 sebesar 81,38 dengan kategori (A) Memuaskan, dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,47% atau kategori Baik. Berdasarkan data di atas, dari tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,23% dari tahun 2022. Dari pencapaian kinerja Nilai Evaluasi AKIP setiap tahun selalu mengalami

kenaikan. Hal ini disebabkan komitmen seluruh pegawai dalam penerapan SAKIP di perangkat daerah dan selalu melakukan perbaikan mulai dari perencanaan, pengukuran, dan pelaporan serta evaluasi untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Adapun beberapa pencapaian program/kegiatan pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

- Pada tahun 2023 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan target kinerja Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim Pm Yang Dihasilkan sebanyak 1 kebijakan, dapat terealisasi 1 kebijakan dengan capaian 100%. Dibandingkan dengan tahun 2022 presentase capaian kinerja dengan target sebanyak 1 kebijakan, juga terealisasi 1 kebijakan (peta potensi peluang investasi daerah Kabupaten Jombang) dengan capaian 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa target kinerja Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim Pm Yang Dihasilkan setiap tahunnya dapat mempertahankan capaian kinerjanya 100% dengan kategori Baik dan mencapai target yang ditentukan yaitu dokumen peta potensi peluang investasi di tahun 2022 dan Tersusun IPRO 3 Sektor (Ternak Sapi di Desa Jenis Gelaran Bareng) di tahun 2023.
- Pada tahun 2023 Promosi Penanaman Modal dengan target kinerja Persentase Tindaklanjut Promosi Penanaman Modal 100%, dapat terealisasi 100%. Dibandingkan dengan tahun 2022 target kinerja dengan target 100%, dengan capaian 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa target kinerja Persentase Tindaklanjut Promosi Penanaman Modal bisa mencapai indikator kinerjanya dengan target yang ditentukan pada tahun 2022 telah dilaksanakan tindak lanjut dari 20 peserta bisnis gathering yang mengisi form kepeminatan. Sehingga capaian kinerja pada tahun 2022-2023 tercapai 100% dengan kategori Baik.
- Pada tahun 2023 Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan dengan target kinerja Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal sebesar 75% dapat terealisasi 117,65% dengan capaian 156,86%. Dibandingkan dengan tahun 2022 target kinerja dengan target 75%, realisasi kinerja 123,53% sehingga capaian kinerjanya 164,71%. Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan target kinerja Persentase

Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal bisa mencapai indikator kinerjanya dengan target yang ditentukan yaitu tahun 2022 terdapat 105 perusahaan yang telah melaporkan LKPM dari total target 85 perusahaan. Sedangkan Terdapat 100 perusahaan yang telah melaporkan LKPM pada TB IV dari total target 85 perusahaan di Tahun 2023. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal dari tahun 2022 dengan capaian 164,71% dan 2023 dengan capaian 156,86% mengalami kenaikan dengan predikat istimewa.

- Pada Tahun 2023 Program Pelayanan Penanaman Modal dengan target kinerja Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan sebesar 82% dapat terealisasi 92,32% sehingga capaian kinerja sebesar 112,58%, Pada tahun 2022 Program Pelayanan Penanaman Modal dengan target kinerja Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan sebesar 80% dapat terealisasi 90,94% sehingga capaian kinerja sebesar 113,67%. Sedangkan pada tahun pada tahun 2022 dari jumlah izin yang terbit sejumlah 12.957 izin, 11.783 izin terbit sesuai standart pelayanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan tahun 2022 dengan capaian 113,67% mengalami kenaikan dengan predikat istimewa. Dan tahun 2023 dari jumlah izin yang terbit sejumlah 21.601 izin, 23.399 izin terbit sesuai standart pelayanan dengan capaian 112,58% mengalami penurunan 1,09%.
- Pada tahun 2023 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan target kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi yang puas dengan pelayanan perizinan 23% dapat terealisasi 23,71% sehingga tercapai sebesar 103,09%. Pada tahun 2022 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan target kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi yang puas dengan pelayanan perizinan 23% dapat terealisasi 27% sehingga tercapai sebesar 116%. Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan target kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi yang puas dengan pelayanan perizinan Pada tahun 2023 pengguna sistem informasi yang puas sebesar 6.855

pengguna. Pada tahun 2022 jumlah pengguna yang puas adalah 5.541 pengguna, sehingga terdapat peningkatan sebesar 23,71 %.

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota pada tahun 2023 dengan target kinerja Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur 100% dapat terealisasi 100% sehingga tercapai sebesar 100%. Pada tahun 2022 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dengan target kinerja Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur 100% dapat terealisasi 100% sehingga tercapai sebesar 100% dengan kategori baik.

Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, antara lain sebagai berikut :

1. Sistem online terpusat sehingga jika ada permasalahan/kendala system tidak bisa fast respon,
2. Tidak adanya helpdesk pusat di wilayah Kabupaten/Kota sehingga jika ada masalah harus melaporkan ke pusat hingga membutuhkan waktu yang lama
3. Perizinan belum terintegrasi satu pintu masih melalui banyak mekanisme atau alur yang harus dilalui,
4. Tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang rendah terkait layanan pengaduan DPMPTSP Kabupaten Jombang,
5. Kewenangan Dpmptsp yang selalu berubah secara dinamis tanpa pemberitahuan dari kementrian terkait sehingga dokumen standar pelayanan perizinan ikut berubah,
6. Rendahnya tingkat pengetahuan perusahaan tentang kewajiban pelaporan LKPM,
7. Masih adanya pelaku usaha yang tidak kooperatif terhadap kegiatan pengawasan pelaksanaan penanaman modal,
8. Kendala teknis terkait dengan instansi lain,
9. Antusiasme pelaku usaha yang rendah untuk mengikuti bimtek,
10. Masih adanya pelaku usaha yang tidak kooperatif terhadap kegiatan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Solusi dari permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi baik dengan cara menghubungi, melalui surat dan datang langsung dengan pusat secara kontinyuitas secara berkelanjutan,
- b. Mendorong Pemerintah Pusat untuk membuat helpdesk di daerah agar supaya jika ada kendala bisa cepat terselesaikan,
- c. Di daerah perizinan melalui banyak pintu karena sesuai tupoksi harus melalui dinas yang sesuai kewenangannya, akan tetapi dari situlah banyak proses yang dilaluinya melalui kelengkapan persyaratan hingga cek/survey ke lapangan yang tentunya memerlukan waktu. Dalam mengatasi permasalahan tersebut maka dilakukannya koordinasi secara berkelanjutan dan mendorong OPD Teknis untuk melakukan monev dengan mengundang OPD yang terkait,
- d. Sosialisasi layanan pengaduan lewat media sosial, banner dll,
- e. Melakukan monev setahun sekali dan memperbaharui dokumen standar pelayanan sesuai kewenangan yang berlaku,
- f. Meningkatkan intensitas pelaksanaan bimtek dan sosialisasi LKPM,
- g. Melakukan komunikasi lebih intensif kepada perusahaan,
- h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait,
- i. Melaksanakan bimtek dengan format acara yang lebih menarik,
- j. Melakukan komunikasi lebih intensif kepada perusahaan,
- k. Melaksanakan bimtek dengan format acara yang lebih menarik.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pencapaian target yaitu:

- a. Meningkatkan kegiatan promosi/sosialisasi mengenai Potensi daerah di Kabupaten Jombang
- b. Pendampingan permasalahan perusahaan dan bimtek penyusunan LKPM
- c. Meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai Perizinan
- d. Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan perizinan.
- e. Peningkatan pelayanan perizinan melalui IT secara online (kemudahan Pelayanan Perizinan)
- f. Penanganan Pengaduan yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun media lainnya.
- g. Penyempurnaan Standart Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan

- h. Penerapan SMM ISO 9001 : 2008
- i. Implementasi SI RINDU NONA dapat meningkatkan target indikator perizinan masuk dan terbit khususnya perizinan non berusaha
- j. Optimalisasi peningkatan Mal Pelayanan Publik.

Program dalam Renstra yang dapat menimbulkan implikasi – implikasi yang mampu mendorong kinerja Perangkat Daerah untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional, diantaranya :

- Peningkatan jumlah pelaporan LKPM online
- Adanya koordinasi yg baik dengan dinas terkait sehingga mempermudah dalam pengumpulan data potensi investasi yang akan digunakan bahan penyusunan peta potensi peluang investasi daerah Kabupaten Jombang
- Sudah tersedianya project prospectus
- Dengan melaksanakan promosi melalui pameran investasi dan web
- Pelaksanaan program BULAGA dapat meningkatkan target indikator perizinan masuk dan terbit khususnya perizinan berusaha
- Implementasi SI RINDU NONA dapat meningkatkan target indikator perizinan masuk dan terbit khususnya perizinan non berusaha
- Sudah diterapkannya pelayanan perizinan non berusaha secara online, melalui aplikasi Sirindunona, dimana pemohon dapat mengajukan izin bidang kesehatan, penelitian dan reklame dari rumah tanpa harus datang ke kantor
- DPMPTSP Kab. Jombang yang merupakan salah satu dari pelayanan publik yang berperan aktif dalam mendapatkan penghargaan dari ombudsman RI dengan predikat kepatuhan tinggi

Kebijakan – kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor – faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut:

- Pendampingan pengajuan izin berusaha
- Pelayanan izin non berusaha
- Pemenuhan komitmen perizinan berusaha
- Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Perizinan (SOP,SPP,SPM,IKM dan ISO)
- Upgrade dan update data informasi perizinan dan penanaman modal

- Monitoring evaluasi pengendalian dan pengawasan penanaman modal dan perizinan
- Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat
- Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan perizinan dan Penanaman Modal
- Temu Usaha (Bisnis Gathering)
- Promosi Potensi Investasi Daerah
- Bimtek LKPM online dan pendampingan LKPM
- Penyusunan Dokumen Perencanaan kebijakan dan Pengembangan Penanaman Modal
- Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Pengadaan sarana dan prasarana, Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana prasarana, gedung kantor dan kendaraan dinas/kendaraan operasional
- Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
- Konsistensi penyusunan dokumen perencanaan, capaian kinerja dan keuangan SKPD sesuai dengan aturan

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 (TB II)
Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun berjalan (n-1) (2024) (s/d TB II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.18	URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PRESENTASE DOKUMEN POTENSI DAN PELUANG INVESTASI YANG DIMANFAATKAN	100%	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	100,00%	100%	0%	0,00%
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Potensi dan Peluang Investasi yang dimanfaatkan	3 Dokumen	100%	100 %	100 %	100,00%	2 Dokumen	0 dokumen	0,00%
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	2 dokumen	0 dokumen	0,00%
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE TINDAK LANJUT PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	100%	100%	100 %	100 %	100,00%	100%	0%	0,00%
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tindak lanjut penyelenggaraan promosi penanaman modal	105 Kali	100%	100 %	100 %	100,00%	35 kali	0 kali	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun berjalan (n-1) (2024) (s/d TB II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 dokumen		5 dokumen	5 dokumen	100,00 %	6 dokumen	0 dokumen	0,00%
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE LAYANAN PERIZINAN YANG DITERBITKAN TEPAT WAKTU SESUAI SOP	85%	90,94%	82 %	92,32 %	112,59 %	82%	86,25%	105,18%
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Pelayanan Perizinan Yang Diterbitkan	95%	91,23%	89 %	88,53 %	99,47 %	90%	95,18%	105,76%
		Persentase Pengaduan Layanan Perizinan Yang Diselesaikan	100%	100%	100 %	100 %	100,00 %	100%	41,67%	41,67%
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6.000 pelaku usaha		6000 pelaku usaha	23.399 pelaku usaha	389,98 %	6.000 pelaku usaha	9245 (7974 berusaha + 1271 non berusaha)	154,08%
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	24 pelaku usaha	100%	800 pelaku usaha	5454 pelaku usaha	681,75 %	24 pelaku usaha	10 pelaku usaha	41,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun berjalan (n-1) (2024) (s/d TB II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2000 kegiatan usaha	67,53%	16 orang	17 orang	106,25 %	2000 kegiatan usaha	7974 kegiatan usaha	398,70%
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA TERHADAP PERATURAN PENANAMAN MODAL	85%	123,53%	75 %	118% %	1,57%	80%	60%	75,00%
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang patuh sesuai dengan ketentuan Penanaman Modal	290 Perusahaan	105 Perusahaan	85 Perusahaan	100 Perusahaan	117,65 %	95 Perusahaan	57 Perusahaan	60,00%
2.18.05.2.01.0004	Peyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	180 kegiatan usaha	105 Perusahaan	85 pelaku usaha	100 pelaku usaha	117,65%	180 kegiatan usaha	0 kegiatan usaha	0,00%
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	30 Pelaku Usaha		90 pelaku usaha	96 pelaku usaha	106,67 %	90 pelaku usaha	88 pelaku usaha	97,78%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun berjalan (n-1) (2024) (s/d TB II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	96 Kegiatan Usaha		16 monev	18 monev	112,50%	95 kegiatan usaha	57 kegiatan usaha	60,00%
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PENGGUNA SISTEM INFORMASI YANG PUAS DENGAN PELAYANAN PERIZINAN	23%	27%	23 %	23,71 %	103,09 %	23%	0%	0,00%
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengguna data dan informasi PM dan perizinan	11.500 pengguna	5.541 Pengguna	4000 pengguna	13.728 pengguna	343,20 %	4000 pengguna	14810 Pengguna (Web perijinan : 13.596+ Sirindunona : 1214)	370,25%
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 dokumen	4 Laporan	4 dokumen	4 dokumen	100,00 %	8 dokumen	4 dokumen	50,00%
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR	100%	100%	100 %	100 %	100,00%	100%	50%	50,00%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun berjalan (n-1) (2024) (s/d TB II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100 %	100 %	100,00%	100%	50%	50,00%
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	10 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	3 dokumen	3 dokumen	100,00%
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 dokumen	16 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%	15 dokumen	11 dokumen	73,33%
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100 %	100 %	100,00%	100%	50%	50,00%
		Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100 %	100 %	100,00%	100%	50%	50,00%
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang	14 Bulan	50 Pegawai	50 Pegawai	100,00%	30 orang/bulan	30 orang/bulan	100,00%
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 Dokumen	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 dokumen	6 dokumen	50,00%
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	17	1 laporan	1 laporan	100,00%	1 laporan	1 laporan	100,00%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun berjalan (n-1) (2024) (s/d TB II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 laporan	1 Laporan	17 laporan	17 laporan	100,00 %	17 laporan	8 laporan	47,06%
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	100%	100%				100%	50%	50,00%
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 paket	31 Stel				30 paket	0 paket	0,00%
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 pegawai					44 orang	44 orang	100,00%
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100 %	100 %	100,00%	100%	50%	50,00%
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 paket	14 Jenis	14 jenis	14 jenis	100,00 %	10 paket	7 paket	70,00%
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 paket	70 Jenis	70 jenis	70 jenis	100,00 %	60 paket	35 paket	58,33%
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	6 Jenis	6 jenis	6 jenis	100,00 %	8 paket	6 paket	75,00%
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	0 Pegawai	3 paket	3 paket	100,00 %	3 paket	3 paket	100,00%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun berjalan (n-1) (2024) (s/d TB II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	10 Jenis	2 paket	2 paket	100,00 %	2 paket	2 paket	100,00%
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	12 Jenis	36 Dokumen	36 Dokumen	100,00 %	3 dokumen	3 dokumen	100,00%
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 laporan	40 Kali	35 laporan	35 laporan	100,00 %	40 laporan	36 laporan	90,00%
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100 %	100 %	100,00%	100%	50%	50,00%
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	60 unit	9 Unit	23 Unit	23 Unit	100,00 %	18 unit	18 unit	100,00%
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100 %	100 %	100,00%	100%	50%	50,00%
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Bulan	12 laporan	12 laporan	100,00 %	12 laporan	6 laporan	50,00%
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Bulan	12 laporan	12 laporan	100,00 %	12 laporan	6 laporan	50,00%
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 jenis	12 Jenis	8 laporan	8 laporan	100,00 %	9 jenis	6 jenis	66,67%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun berjalan (n-1) (2024) (s/d TB II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100 %	100 %	100,00%	100%	50%	50,00%
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00 %	1 unit	1 unit	100,00%
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	1 Unit	24 Unit	24 Unit	100,00 %	24 unit	20 unit	83,33%
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	2 Gedung	2 gedung	2 gedung	100,00 %	2 unit	2 unit	100,00%
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	90 unit	90 Unit	106 Unit	106 Unit	100,00 %	132 unit	58 unit	43,94%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayanan dan perizinan dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang yang membantu Bupati Kabupaten Jombang, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang tahun 2024, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang sudah menyelenggarakan fungsi pelayanan langsung pada masyarakat dalam hal ini investor. Fungsi yang diselenggarakan pada ruang lingkup fasilitas baik pada investor maupun pelaku UMKM di Kabupaten Jombang dan sebagai front office pelayanan investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Jombang.

Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN JOMBANG

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024 (S/d TB II)	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	
1	2	3	4	8	8	8					
1.	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi			5%	5,10%	5,20%	5,05%		5,10%	5,20%	Perhitungan dilakukan pada akhir tahun 2024 karena memerlukan nilai realisasi secara keseluruhan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan nilai investasi
	Nilai Realisasi Investasi			1.900 (dalam Milyar Rupiah)	2.000 (dalam Milyar Rupiah)	2.100 (dalam Milyar Rupiah)	1.715.913.003. 483	175.897.327.8 23	2.000. (dalam Milyar Rupiah)	2.100(dalam Milyar Rupiah)	Pada TB I realisasi investasi sebesar Rp 175.897.327.823, - dari target Tahun 2024 sebesar Rp 1,9 T
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			85	86	87	89,93	0	86	87	Pengukuran / penilaian IKM layanan perizinan, IPP dan IKPP dilaksanakan pada TB IV
	Indeks Pelayanan Publik (IPP)			4,1	4,2	4,25	4,43	0	4,2	4,25	
	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik			71	73	75	NA		73	75	
3.	Nilai Evaluasi AKIP PD			80,5	81	81,5	81,38	-	81	81,5	Menunggu hasil evaluasi AKIP oleh Tim Evaluator

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tersebut selaras dengan Sasaran RPD Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 yang pertama, yakni *“Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi”*, serta Sasaran RPD yang keempat *“Meningkatnya PDRB sektor Unggulan dan Investasi Daerah”*. Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam jangka waktu tahunan, sampai tiga tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas.

Selain tujuan, dirumuskan Sasaran Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Indeks Pelayanan Publik (IPP)
- Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik

2. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : - Nilai Evaluasi AKIP PD

3. Meningkatkan Realisasi Investasi

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : - Nilai Realisasi Investasi

Dalam mendukung penyelenggaraan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang mempunyai peran strategis dalam hal sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi panduan, standar pelayanan dan SOP Perizinan sebagai upaya untuk membangun persamaan persepsi;
- b. Membangun komitmen dan pelayanan menjadikan bahwa birokrasi perizinan belum berjalan secara efisien dan efektif, sehingga masih ditemukan berbagai masalah dalam pelayanan. Masalah-masalah ini memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dalam terhadap pelayanan publik dan demi letak khususnya investasi daerah beberapa masalah perizinan termasuk di bidang Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan yang sering ditemui diantaranya adalah :
 - Waktu Pelayanan Perizinan Relatif Lama;
 - Biaya yang relatif tinggi;
 - Tidak transparan dan terjadinya pungutan liar;
 - Tidak ada kepastian hukum

Penentuan Isu-isu Strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang antara lain :

1. Implementasi UU Cipta Kerja akan membawa perubahan mekanisme izin
2. Belum berakhirnya Pandemi Covid-19 yang berimbas menurunnya jumlah perizinan dan menurunnya nilai realisasi investasi
3. Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP)
4. Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap peraturan dan ketentuan penanaman modal
5. Jaminan Kenyamanan dalam berinvestasi
6. Kurang antusiasnya investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Jombang
7. Pengembangan Aplikasi pelayanan Perizinan Non berusaha (Si Rindunona) berbasis web;

Secara umum pelaksanaan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2021 berjalan dengan baik dan lancar, dengan tetap memperhatikan munculnya permasalahan-permasalahan yang senantiasa

diupayakan penyelesaian yang sebaik-baiknya, baik terkait pelaksanaan teknis pelayanan kepada masyarakat maupun secara teknis koordinatif dengan instansi teknis terkait perizinan.

Identifikasi permasalahan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan tugas, pokok dan fungsi meliputi :

1. Masalah jaminan kenyamanan dalam berinvestasi, hambatan ini lebih disebabkan oleh karena tidak terlaksananya secara maksimal SOP dalam proses pelayanan penanaman modal dan sumber daya untuk pelayanan penanaman modal yang kurang memadai baik berupa sarana/prasarana dan SDM penanaman modal.
2. Masih rendahnya tingkat inovasi dan capaian keberhasilan pelayanan penanaman modal yang meliputi aktivitas promosi investasi, perijinan investasi dan insentif penanaman modal di daerah.
3. Masih kurangnya penanam modal atau investor yang menjalin kemitraan dengan pelaku usaha kecil menengah (UKM), ini disebabkan karena sebagian besar produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku UKM masih belum sejalan dengan kebutuhan investor yang ada pada daerah.
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi unggulan daerah (pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan industri pengolahan) sebagai produk yang berdaya saing nasional maupun internasional.
5. Sistem regulasi yang mengatur tentang kebijakan, fasilitas dan insentif bagi penanaman modal yang kurang menarik sehingga menyebabkan minat untuk berinvestasi semakin berkurang
6. Pertumbuhan investasi yang telah dicapai belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja.
7. Belum terbentuknya regulasi tentang penyederhanaan perizinan dan non perizinan yang akan menunjang dalam pengembangan investasi.
8. Belum optimalnya pelayanan publik yang dapat menunjang perkembangan iklim usaha di Kabupaten Jombang.
9. Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD Teknis sehingga proses perizinan melebihi SOP yang ditetapkan.

Berbagai permasalahan dan langkah-langkah antisipatif sebagaimana penjelasan diatas, kiranya dipandang sebagai upaya penyempurnaan proses pelaksanaan pelayanan perizinan yang selama ini telah berlangsung dengan baik, sekaligus sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan kegiatan di tahun 2023.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap kebijakan – kebijakan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat.

Seperti halnya iklim investasi di Indonesia, dihadapkan tidak saja pada tantangan untuk menarik investasi baru, tetapi juga tantangan untuk mempertahankan investasi yang sudah ada. Kepindahan sebagian lainnya masih tahap rencana beberapa perusahaan multi-nasional menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia sudah berada pada tahap yang cukup mengkhawatirkan. Kedepan, diperkirakan tantangan tersebut akan kian berat, bukan hanya karena lingkungan eksternal yang semakin ketat, akan tetapi juga karena daya tarik domestik yang masih relatif rendah. Secara eksternal, tantangan dimaksud, antara lain terdapat kecenderungan arus masuk penanaman modal asing (PMA) menurun akibat meningkatnya ketidakpastian global yang mempengaruhi rasa aman dalam kegiatan penanaman modal, kemungkinan terjadinya berbagai spekulasi dalam proses merger dan akuisisi perusahaan, serta masalah-masalah kelembagaan seperti kelambatan proses privatisasi di beberapa negara.

Keberadaan regulasi pelayanan penanaman modal di Kabupaten Jombang saat ini merupakan kebutuhan utama untuk membangun iklim investasi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang sebagai organisasi perangkat daerah yang baru dibentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016. Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indicator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang. Di samping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang

program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran SKPD seperti yang tertuang dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tahun 2024-2026.

Adapun rancangan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tahun 2025 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut :

TABEL 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2025

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kab. Jombang	PRESENTASE DOKUMEN POTENSI DAN PELUANG INVESTASI YANG DIMANFAATKAN	100%	172.645.900	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kab. Jombang	PRESENTASE DOKUMEN POTENSI DAN PELUANG INVESTASI YANG DIMANFAATKAN	100%	172.645.900	
2.18.02.2.02.0004	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Potensi dan Peluang Investasi yang dimanfaatkan	2 Dokumen	172.645.900	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Potensi dan Peluang Investasi yang dimanfaatkan	2 Dokumen	172.645.900	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen	172.645.900	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen	172.645.900	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kab. Jombang	PERSentase TINDAK LANJUT PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	100%	647.355.200	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kab. Jombang	PERSentase TINDAK LANJUT PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	100%	647.355.200	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	Kab. Jombang	Jumlah tindak lanjut penyelenggaraan promosi penanaman modal	35 Kali	647.355.200	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi	Kab. Jombang	Jumlah tindak lanjut penyelenggaraan promosi penanaman modal	35 Kali	647.355.200	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah Kabupaten/Kota					Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
2.18.03.2.01.002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 Dokumen	647.355.200	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 Dokumen	647.355.200	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kab. Jombang	PERSENTASE LAYANAN PERIZINAN YANG DITERBITKAN TEPAT WAKTU SESUAI SOP	82 Persen	263.313.200	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kab. Jombang	PERSENTASE LAYANAN PERIZINAN YANG DITERBITKAN TEPAT WAKTU SESUAI SOP	82 Persen	263.313.200	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Jombang	Presentase Pelayanan Perizinan Yang Diterbitkan	90 Persen	224.973.200	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Jombang	Presentase Pelayanan Perizinan Yang Diterbitkan	90 Persen	224.973.200	
		Kab. Jombang	Persentase Pengaduan Layanan Perizinan Yang Diselesaikan	100%	38.340.000		Kab. Jombang	Persentase Pengaduan Layanan Perizinan Yang Diselesaikan	100%	38.340.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.0 4.2.01. 0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Jombang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6.000 pelak u usaha	194.499.700	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Jombang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6.000 pelak u usaha	194.499.700	
2.18.0 4.2.01. 0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Jombang	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	24 orang	38.340.000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Jombang	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	24 orang	38.340.000	
2.18.0 4.2.01. 0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Jombang	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2.000 kegiat an usaha	30.473.500	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Jombang	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2.000 kegiat an usaha	30.473.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kab. Jombang	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA TERHADAP PERATURAN PENANAMAN MODAL	80%	176.660.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kab. Jombang	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA TERHADAP PERATURAN PENANAMAN MODAL	80%	176.660.000	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah perusahaan yang patuh sesuai dengan ketentuan Penanaman Modal	90 Perusahaan	176.660.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah perusahaan yang patuh sesuai dengan ketentuan Penanaman Modal	90 Perusahaan	176.660.000	
2.18.05.2.01.004	Peyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.	Kab. Jombang	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DAK Non Fisik		Peyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.	Kab. Jombang	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DAK Non Fisik		
2.18.05.2.01.005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Jombang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	90 Pelaku usaha	138.180.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Jombang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	90 Pelaku usaha	138.180.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.05 2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Jombang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	95 Kegiatan Usaha	38.480.000	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Jombang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	95 Kegiatan Usaha	38.480.000	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kab. Jombang	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PENGGUNA SISTEM INFORMASI YANG PUAS DENGAN PELAYANAN PERIZINAN	23%	155.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kab. Jombang	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PENGGUNA SISTEM INFORMASI YANG PUAS DENGAN PELAYANAN PERIZINAN	23%	155.000.000	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah pengguna data dan informasi PM dan perizinan	4.000 pengguna	155.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah pengguna data dan informasi PM dan perizinan	4.000 pengguna	155.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.0 6.2.01. 0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Jombang	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 Dokumen	155.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Jombang	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 Dokumen	155.000.000	
2.18.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Jombang	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR	100%	6.388.936.812	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Jombang	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR	100%	6.388.936.812	
2.18.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	62.655.250	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	62.655.250	
2.18.01 .2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.277.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.277.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01 .2.01.0 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	42.377.750	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	42.377.750	
2.18.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	4.862.722.347	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	4.862.722.347	
		Kab. Jombang	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%			Kab. Jombang	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%		
2.18.01 .2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang	4.666.894.347	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang	4.666.894.347	
2.18.01 .2.02. 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	185.850.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	185.850.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01 .2.02. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi i Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.688.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi i Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.688.000	
2.18.01 .2.02. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	17 Laporan	7.290.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	7.290.000	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	100 Persen	18.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	100 Persen	18.000.000	
2.18.01 .2.05. 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Jombang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	18.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Jombang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	18.000.000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	491.298.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	491.298.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01 .2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	8.829.150	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	8.829.150	
2.18.01 .2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Paket	113.737.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Paket	113.737.600	
2.18.01 .2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Jombang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	1.989.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Jombang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	1.989.000	
2.18.01 .2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	136.930.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	136.930.000	
2.18.01 .2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Jombang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	52.105.050	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Jombang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	52.105.050	
2.18.01 .2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	40.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	40.400.000	
2.18.01 .2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	137.308.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	137.308.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01 .2.07. 0010	Pengadaan Sarana da Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah unit Sarana da Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan			Pengadaan Sarana da Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah unit Sarana da Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan			
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	718.462.415	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	718.462.415	
2.18.01 .2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	
2.18.01 .2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	186.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	186.000.000	
2.18.01 .2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	529.462.415	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	529.462.415	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	235.798.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	235.798.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01 .2.09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	51.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	51.000.000	
2.18.01 .2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	74.998.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	74.998.100	
2.18.01 .2.09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	54.999.900	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	54.999.900	
2.18.01 .2.09. 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	90 unit	54.800.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	90 unit	54.800.000	
TOTAL					7.803.911.112	7.803.911.112					

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2025 tidak ada usulan dari masyarakat langsung, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten, informasi dari Propinsi, karena usulan program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN JOMBANG

Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kab. Jombang	PRESENTASE DOKUMEN POTENSI DAN PELUANG INVESTASI YANG DIMANFAATKAN	100%	172.645.900	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Potensi dan Peluang Investasi yang dimanfaatkan	2 Dokumen	172.645.900	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen	172.645.900	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kab. Jombang	PERSentase TINDAK LANJUT PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	100%	647.355.200	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah tindak lanjut penyelenggaraan promosi penanaman modal	35 Kali	647.355.200	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 Dokumen	647.355.200	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kab. Jombang	PERSentase LAYANAN PERIZINAN YANG DITERBITKAN TEPAT WAKTU SESUAI SOP	82 Persen	263.313.200	

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Jombang	Presentase Pelayanan Perizinan Yang Diterbitkan	90 Persen	224.973.200	
		Kab. Jombang	Persentase Pengaduan Layanan Perizinan Yang Diselesaikan	100%	38.340.000	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Jombang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6.000 pelaku usaha	194.499.700	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Jombang	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	24 orang	38.340.000	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Jombang	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2.000 kegiatan usaha	30.473.500	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kab. Jombang	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA TERHADAP PERATURAN PENANAMAN MODAL	80%	176.660.000	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah perusahaan yang patuh sesuai dengan ketentuan Penanaman Modal	90 Perusahaan	176.660.000	

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
2.18.05.2.01.0004	Peyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.	Kab. Jombang	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DAK Non Fisik		
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Jombang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	90 Pelaku usaha	138.180.000	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Jombang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	95 Kegiatan Usaha	38.480.000	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kab. Jombang	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PENGGUNA SISTEM INFORMASI YANG PUAS DENGAN PELAYANAN PERIZINAN	23%	155.000.000	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah pengguna data dan informasi PM dan perizinan	4.000 pengguna	155.000.000	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis	Kab. Jombang	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	8 Dokumen	155.000.000	

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Jombang	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR	100%	6.388.936.812	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	62.655.250	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.277.500	
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	42.377.750	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	4.862.722.347	
		Kab. Jombang	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%		
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang	4.666.894.347	
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	185.850.000	
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.688.000	

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	7.290.000	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	100 Persen	18.000.000	
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Jombang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	18.000.000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	491.298.800	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	8.829.150	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Paket	113.737.600	
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Jombang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	1.989.000	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	136.930.000	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Jombang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	52.105.050	
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	40.400.000	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	137.308.000	

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur			
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana da Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah unit Sarana da Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan			
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	718.462.415	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	186.000.000	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	529.462.415	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	235.798.000	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	51.000.000	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	74.998.100	
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	54.999.900	

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	90 unit	54.800.000	
TOTAL					7.803.911.112	

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab 3

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Pembangunan Nasional, Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar Bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJPN 2025-2045. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 disusun sebagai acuan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai sasaran Pembangunan nasional. RKP 2025 menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum didalam Visi pembangunan nasional 2025-2045 didalam Rancangan Akhir RPJPN adalah “**Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan**” yang diwujudkan melalui 8 (delapan) (Misi) Agenda Pembangunan, berupa Transformasi Menyeluruh, yaitu:

1. Transformasi Sosial;
2. Transformasi Ekonomi;
3. Transformasi Tata Kelola;
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
8. Kestinambungan Pembangunan

Berdasarkan visi dan misi serta agenda pembangunan nasional tersebut pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk mewujudkan tercapainya Indonesia maju, mandiri dan adil. Hal tersebut juga dapat didukung melalui strategi dan kebijakan kunci

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat, yaitu *Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia (MP3EI)* dan *Masterplan percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan indonesia (MP3KI)*. Program MP3EI akan menjadi payung semua kegiatan infrastruktur di wilayah indonesia dengan pengembangan koridor - koridor utama yang menjadi pendorong dan penopang kegiatan ekonomi di wilayah sekitarnya serta didukung dengan perbaikan konektivitas antar daerah, diharapkan mampu mewujudkan integrasi pasar hingga ke pelosok desa. Dengan strategi tersebut juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang diperkirakan akan lebih baik dan merata sejalan dengan program MP3KI yang diarahkan dalam betuk akselerasi program - program kerja pengentasan kemiskinan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dengan mengacu dan berpedoman Tema pembangunan RKP tahun 2025: **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**., maka Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2025, yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);



Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi mellalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 juga mengamanatkan untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Pelayanan publik merupakan cermin dari birokrasi yang dijalankan oleh sebuah pemerintahan. Salah satu prioritas kerja Bapak Presiden Jokowi Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin untuk mencapai Indonesia Maju adalah melalui Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik. Pada rapat kabinet beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden memberikan arahan untuk memperkuat dan mengembangkan MPP menjadi ujung tombak pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai wujud nyata pelaksanaan reformasi birokrasi. Sejalan dengan arahan strategis tersebut, maka dilakukan percepatan pembentukan MPP di seluruh Indonesia. Mal pelayanan publik hadir sebagai salah satu terobosan pemerintah dalam menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang



Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

cepat, tepat, dan murah. Mal pelayanan publik diselenggarakan dengan menyatukan seluruh jenis pelayanan yang ada di suatu daerah ke dalam satu tempat dan sistem.

Mal pelayanan publik adalah wujud transformasi birokrasi pelayanan publik dari tradisional menuju model birokrasi yang modern. Dengan Mal Pelayanan Publik, pelayanan ke depan mulai diubah dari awalnya menggunakan kertas/dokumen, nantinya menjadi *paperless* (tidak perlu kertas). Mengedepankan model birokrasi yang tidak hanya *e-government* namun meningkat menjadi *smart government*.

Tema Pembangunan RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sasaran Pokok – V : 2024-2025 antara lain :

“Mewujudkan Kabupaten Jombang sebagai sentra agribisnis di Jawa Timur Tahun 2025”

Arah Kebijakan Tahun 2025 pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 yaitu :

“Meningkatkan daya dukung infrastruktur berkelanjutan yang mendorong industri agribisnis dan pembangunan wilayah”

Tema RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2025

“Hilirisasi Agrobisnis”

Prioritas Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2025

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemenuhan Layanan Dasar dan Kehidupan Yang Harmonis;
2. Peningkatan Layanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas;
3. Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan dan Merata.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

Tujuan yang diprogramkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang pada hakekatnya merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai/dihasilkan.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tersebut selaras dengan Sasaran RPD Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 yang pertama, yakni

- Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

Indikator : Indeks Reformasi Kabupaten

Target : 72,5

- Meningkatkan nilai Realisasi Investasi Daerah

Indikator : Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi

Target : 5,10%

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Sebagai penjabaran dari tujuan maka sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Selain tujuan, dirumuskan Sasaran Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- ✓ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target : 86

- ✓ Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Target : 4,2

- ✓ Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik

Target : 73

2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- ✓ Nilai Evaluasi AKIP PD

Target : 81

3. Meningkatnya Realisasi Investasi

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- ✓ Nilai Realisasi Investasi

Target : 2 Trilyun Rupiah

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Seluruh proses perencanaan pembangunan dan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang sudah melaksanakan dan mengakomodasi kepentingan Pengarusutamaan Reponsive Gender (PPRG) sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan**a. Faktor – faktor Rumusan Program dan Kegiatan**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2024, program dan kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

- Program Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan :

- ✓ Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

- Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan:

- ✓ Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2. Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan:

- ✓ Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota

- Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan:

- ✓ Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan:

- ✓ Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

3. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Kegiatan:

- ✓ Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- ✓ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- ✓ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- ✓ Administrasi Umum Perangkat Daerah
- ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Rekapitulasi Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Terdapat 6 (enam) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2025 yang total kebutuhan anggaran sebesar Rp 7.803.911.112 (*Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Seratus Dua Belas Rupiah*) yang sumber pendanaan berasal dari APBD TA 2025, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

- Program Program Pelayanan Penanaman Modal

Indikator Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP dengan target kinerja 82% dan pagu indikatif sebesar Rp. 263.313.200,

Kegiatan :

- ✓ Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko

- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

- Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Indikator Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan dengan target 23% dan pagu indikatif sebesar Rp. 155.000.000,-

Kegiatan:

- ✓ Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan:

- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

2. Meningkatnya Realisasi Investasi

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Indikator Presentase Dokumen Potensi Dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan dengan target 100% dan pagu indikatif sebesar Rp. 172.645.900,-

Kegiatan:

- ✓ Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota

Sub kegiatan:

- Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

- Program Promosi Penanaman Modal

Indikator Persentase Tindak Lanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal dengan target 100% dan pagu indikatif sebesar Rp. 647.355.200,-

Kegiatan:

- ✓ Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal dengan target 80% dan pagu indikatif sebesar Rp. 176.660.000,-

Kegiatan:

- ✓ Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- Pengawasan Penanaman Modal

3. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Indikator Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur dengan target 100% dan pagu indikatif sebesar Rp. 6.388.936.812,-

Kegiatan:

- ✓ Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan:

- ✓ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD,
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Kegiatan:

- ✓ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan:

- ✓ Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan:

- ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- ✓ Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kegiatan:

- ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

- ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berikut Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang disajikan pada tabel di bawah ini:



Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan SubKegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Jombang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun (Tahun Rencana)				Catatan	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.02	PROGRAM PENCEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PRESENTASE DOKUMEN POTENSI DAN PELUANG INVESTASI YANG DIMANFAATKAN	Kab. Jombang	100%	172.645.900	APBD		100%	172.645.900
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Potensi dan Peluang Investasi yang dimanfaatkan	Kab. Jombang	2 Dokumen	172.645.900	APBD		2 Dokumen	172.645.900
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	2 Dokumen	172.645.900	APBD		2 Dokumen	172.645.900
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE TINDAK LANJUT PENVELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kab. Jombang	100%	647.355.200	APBD		100%	647.355.200
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tindak lanjut penyelenggaraan promosi penanaman modal	Kab. Jombang	35 Kali	647.355.200	APBD		35 Kali	647.355.200
2.18.03.2.01.0002	Delaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	6 Dokumen	647.355.200	APBD		6 Dokumen	647.355.200



No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun (Tahun Rencana)				Catatan	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE LAYANAN PERIZINAN YANG DITERBITKAN TEPAT WAKTU SESUAI SOP	Kab. Jombang	85 Persen	263.313.200	APBD		82 Persen	263.313.200
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Pelayanan Perizinan Yang Diterbitkan	Kab. Jombang	92 Persen	224.973.200	APBD		90 Persen	224.973.200
		Persentase Pengaduan Layanan Perizinan Yang Diselesaikan	Kab. Jombang	100%	38.340.000	APBD		100%	38.340.000
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Jombang	8.000 pelaku usaha	194.499.700	APBD		6.000 pelaku usaha	194.499.700
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Jombang	16 orang	38.340.000	APBD		24 orang	38.340.000
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kab. Jombang	2.500 kegiatan usaha	30.473.500	APBD		2.000 kegiatan usaha	30.473.500



No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun (Tahun Rencana)				Catatan	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA TERHADAP PERATURAN PENANAMAN MODAL	Kab. Jombang	85%	176.660.000	APBD		80%	176.660.000
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang patuh sesuai dengan ketentuan Penanaman Modal	Kab. Jombang	95 Perusahaan	176.660.000	APBD		90 Perusahaan	176.660.000
2.18.05.2.01.0004	Peyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Jombang	DAK Non Fisik		APBD		DAK Non Fisik	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Jombang	30 Pelaku usaha	138.180.000	APBD		90 Pelaku usaha	138.180.000
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Jombang	95 Kegiatan Usaha	38.480.000	APBD		95 Kegiatan Usaha	38.480.000



No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun (Tahun Rencana)				Catatan	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PENGGUNA SISTEM INFORMASI YANG PUAS DENGAN PELAYANAN PERIZINAN	Kab. Jombang	25%	155.000.000	APBD		23%	155.000.000
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengguna data dan informasi PM dan perizinan	Kab. Jombang	3.500 pengguna	155.000.000	APBD		4.000 pengguna	155.000.000
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Jombang	8 Dokumen	155.000.000	APBD		8 Dokumen	155.000.000
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR	Kab. Jombang	100%	6.388.936.812	APBD		100%	6.388.936.812
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Kab. Jombang	100%	62.655.250	APBD		100%	62.655.250
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	3 Dokumen	20.277.500	APBD		3 Dokumen	20.277.500



No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun (Tahun Rencana)				Catatan	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jombang	15 Laporan	42.377.750	APBD		15 Laporan	42.377.750
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	Kab. Jombang	100%	4.862.722.347	APBD		100%	4.862.722.347
		Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Kab. Jombang	100%		APBD		100%	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jombang	50 orang	4.666.894.347	APBD		50 orang	4.666.894.347
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Jombang	12 Dokumen	185.850.000	APBD		12 Dokumen	185.850.000
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Jombang	1 Laporan	2.688.000	APBD		1 Laporan	2.688.000

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun (Tahun Rencana)				Catatan	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Jombang	17 Laporan	7.290.000	APBD		17 Laporan	7.290.000
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	Kab. Jombang	100 Persen	18.000.000	APBD		100 Persen	18.000.000
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Jombang	50 Paket	18.000.000	APBD		30 Paket	18.000.000
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Jombang	100%	491.298.800	APBD		100%	491.298.800
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	14 Paket	8.829.150	APBD		14 Paket	8.829.150
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	80 Paket	113.737.600	APBD		80 Paket	113.737.600
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Jombang	6 Paket	1.989.000	APBD		6 Paket	1.989.000
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	3 Paket	136.930.000	APBD		3 Paket	136.930.000



No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun (Tahun Rencana)				Catatan	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.012.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Jombang	2 Paket	52.105.050	APBD		2 Paket	52.105.050
2.18.012.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Jombang	3 Dokumen	40.400.000	APBD		3 Dokumen	40.400.000
2.18.012.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jombang	40 Laporan	137.308.000	APBD		40 Laporan	137.308.000
2.18.012.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Jombang			APBD			
2.18.012.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	Kab. Jombang			APBD			
2.18.012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Jombang	100%	718.462.415	APBD		100%	718.462.415
2.18.012.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Jombang	12 Laporan	3.000.000	APBD		12 Laporan	3.000.000
2.18.012.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Jombang	12 Laporan	186.000.000	APBD		12 Laporan	186.000.000
2.18.012.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	9 Laporan	529.462.415	APBD		9 Laporan	529.462.415



No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun (Tahun Rencana)				Catatan	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Kab. Jombang	100%	235.798.000	APBD		100%	235.798.000
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Jombang	1 unit	51.000.000	APBD		1 unit	51.000.000
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Jombang	24 unit	74.998.100	APBD		24 unit	74.998.100
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Jombang	2 unit	54.999.900	APBD		2 unit	54.999.900
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Jombang	90 unit	54.800.000	APBD		90 unit	54.800.000
TOTAL					7.803.911.112				7.803.911.112

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab 4

4.1 RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Berikut adalah Rencana Kerja Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan pada Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang :

Tabel 4.1
Rencana Kerja Dan Kerangka Pendanaan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jombang Tahun 2025

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PRESENTASE DOKUMEN POTENSI DAN PELUANG INVESTASI YANG DIMANFAATKAN	Kab. Jombang	100%	172.645.900	APBD
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Potensi dan Peluang Investasi yang dimanfaatkan	Kab. Jombang	2 Dokumen	172.645.900	APBD
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	2 Dokumen	172.645.900	APBD
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE TINDAK LANJUT PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kab. Jombang	100%	647.355.200	APBD
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tindak lanjut penyelenggaraan promosi penanaman modal	Kab. Jombang	35 Kali	647.355.200	APBD
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	6 Dokumen	647.355.200	APBD
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE LAYANAN PERIZINAN YANG DITERBITKAN TEPAT WAKTU SESUAI SOP	Kab. Jombang	85 Persen	263.313.200	APBD
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Pelayanan Perizinan Yang Diterbitkan	Kab. Jombang	92 Persen	224.973.200	APBD
		Persentase Pengaduan Layanan Perizinan Yang Diselesaikan	Kab. Jombang	100%	38.340.000	APBD
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Jombang	8.000 pelaku usaha	194.499.700	APBD

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.18.04.2.0 1.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Jombang	16 orang	38.340.000	APBD
2.18.04.2.0 1.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kab. Jombang	2.500 kegiatan usaha	30.473.500	APBD
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA TERHADAP PERATURAN PENANAMAN MODAL	Kab. Jombang	85%	176.660.000	APBD
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang patuh sesuai dengan ketentuan Penanaman Modal	Kab. Jombang	95 Perusahaan	176.660.000	APBD
2.18.05.2.0 1.0004	Peyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Jombang	DAK Non Fisik		APBD
2.18.05.2.0 1.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Jombang	30 Pelaku usaha	138.180.000	APBD
2.18.05.2.0 1.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Jombang	95 Kegiatan Usaha	38.480.000	APBD
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PENGGUNA SISTEM INFORMASI YANG PUAS DENGAN PELAYANAN PERIZINAN	Kab. Jombang	25%	155.000.000	APBD
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengguna data dan informasi PM dan perizinan	Kab. Jombang	3.500 pengguna	155.000.000	APBD
2.18.06.2.0 1.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Jombang	8 Dokumen	155.000.000	APBD

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR	Kab. Jombang	100%	6.388.936.812	APBD
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Kab. Jombang	100%	62.655.250	APBD
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	3 Dokumen	20.277.500	APBD
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jombang	15 Laporan	42.377.750	APBD
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	Kab. Jombang	100%	4.862.722.347	APBD
		Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Kab. Jombang	100%		APBD
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jombang	50 orang	4.666.894.347	APBD
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Jombang	12 Dokumen	185.850.000	APBD
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Jombang	1 Laporan	2.688.000	APBD
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Jombang	17 Laporan	7.290.000	APBD
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	Kab. Jombang	100 Persen	18.000.000	APBD
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Jombang	50 Paket	18.000.000	APBD
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Jombang	100%	491.298.800	APBD
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	14 Paket	8.829.150	APBD
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	80 Paket	113.737.600	APBD

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.18.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Jombang	6 Paket	1.989.000	APBD
2.18.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	3 Paket	136.930.000	APBD
2.18.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Jombang	2 Paket	52.105.050	APBD
2.18.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Jombang	3 Dokumen	40.400.000	APBD
2.18.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jombang	40 Laporan	137.308.000	APBD
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Jombang			APBD
2.18.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	Kab. Jombang			APBD
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Jombang	100%	718.462.415	APBD
2.18.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Jombang	12 Laporan	3.000.000	APBD
2.18.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Jombang	12 Laporan	186.000.000	APBD
2.18.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	9 Laporan	529.462.415	APBD
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Kab. Jombang	100%	235.798.000	APBD
2.18.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Jombang	1 unit	51.000.000	APBD
2.18.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Jombang	24 unit	74.998.100	APBD
2.18.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Jombang	2 unit	54.999.900	APBD
2.18.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Jombang	90 unit	54.800.000	APBD
TOTAL					7.803.911.112	



PENUTUP**Bab
5**

Sebagai uraian penutup dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2025, akan disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja OPD yang pada hakekatnya merupakan rencana capaian kinerja tahun yang bersangkutan, disusun dengan memperhatikan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang serta mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Bahwa untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 maka ditetapkan Program dan Kegiatan tahunan serta kebijakan/strategi untuk mengerahkan segala potensi dan mengurangi keterbatasan/kendala yang ada dalam mencapai tujuan dan sasaran.
2. Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang yang rencana dilaksanakan pada tahun 2025 dititikberatkan pada peningkatan efektifitas pelayanan perizinan dan Penanaman Modal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang yaitu :
 - a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
 - b. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah
 - c. Meningkatnya Realisasi Investasi
3. Untuk ketersediaan anggaran masih belum mencukupi sesuai dengan rancangan awal dan terjadinya defisit APBD, sehingga untuk program kegiatan di tahun 2025 diprioritaskan pada kegiatan peningkatan pelayanan perizinan.

Demikian Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2025 yang disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Jombang, 15 Juli 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KABUPATEN JOMBANG**



Dra. WOR WINDARI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19731204 199202 2 001



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

 **Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No. 151 Jombang**

 **Telp. 0321. 873333 Fax. 0321. 851733**

 **dpmpstsp.jombangkab.go.id**

